



PKL Mau Ditata, Tolak Direlokasi

Pemalni Anggap Sterilisasi Bukan Suara Resmi PPM

JOGJA - Para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di depan took-toko di Malioboro tegas menolak permintaan Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), yang meminta area depan tokonya disterilkan dari PKL. Mereka berpendapat, hingga saat ini sosialisasi dari Pemprov DIJ maupun Pemkot Jogja tidak pernah membi-

carakan relokasi.

"Itu hanya tuntutan sepihak Cuncun saja, pemilik toko dan pengurus PPM lainnya tidak pernah minta seperti itu," ujar Ketua Paguyuban Pelukis, Perajin dan PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni) Slamet Santoso ditemui di Malioboro kemarin (4/7). Menurut dia selama ini tidak ada masalah antara pemilik toko dengan PKL yang berjualan di depannya. Gubernur DIJ Sultan HB X saja menurut mereka mengatakan PKL itu ciri khas Malioboro.

Tapi Slamet yang sehari-hari berju-

alan kaos di depan Jogja Library itu mengaku siap untuk ditata. Tapi untuk direlokasi, dia tegas menolaknya. Termasuk kemungkinan untuk dipindahkan ke eks Bioskop Indra, yang sedang dibangun menjadi sentra PKL. "Terlalu dini bicara PKL akan dipindah ke sana. Selama ini tidak ada pembicaraan seperti itu," ungkapnya.

Yang ada, jelas dia, setelah pembangunan jalur pedestrian di sisi barat Malioboro selesai, Pemalni yang selama ini berjualan mepet di depan toko akan dipindahkan ke sisi timur PKL yang tergabung dalam Paguyuban

Tri Dharma. Nantinya Tri Dharma berjualan menghadap barat dan Pemalni menghadap timur. "Supaya rapi juga akan diseragamkan gerobaknya," jelas dia.

Slamet menambahkan keberadaan PKL di Malioboro, khususnya Pemalni sudah legal dan terdaftar di UPT Malioboro. Menurut dia PKL di Malioboro sudah ada sejak 1980-an dan selama ini tidak ada masalah. Termasuk dengan pemilik toko. PKL juga sudah menaati aturan maksimal pukul 24.00 gerobak PKL harus sudah keluar dari Malioboro. "Biasanya malah

pukul 22.00 sudah dibersihkan. Karena kalau lewat pukul 24.00 bisa kena penertiban," ungkapnya.

Mereka pun sudah mengantongi izin yang dikeluarkan Dinas Pariwisata Kota Jogja, yang diperpanjang tiap dua tahun. Untuk para PKL sendiri, Slamet mengakui di Malioboro beberapa merupakan warga pendatang luar Kota Jogja. Itu disebabkan karena warga asli Kota Jogja yang enggan menjadi PKL di Malioboro. Tapi meski pendatang, rata-rata sudah mengantongi KTP Kota Jogja. "Ada yang dari Padang, Madura tapi yang asli Jogja

juga banyak," ujar Slamet yang warga Jlagran Gedongtengen itu.

Sebelumnya PPM yang diketuai Budi Susilo meminta kepada Pemkot Jogja untuk mengembalikan hak tanah mereka yang selama ini dipakai PKL. Alasannya keberadaan PKL di depan toko mereka membuat pendapatan toko turun drastis. Padahal lahan yang dipakai PKL saat ini adalah lahan milik toko yang dulunya diminta untuk dijadikan pedestrian. "Kalau khususnya Malioboro itu PKL, mending saya juga jadi PKL biar tokonya jadi gudang saja," sindirnya. (pra/din/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 06 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005